

ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN DI PROVINSI GORONTALO

Ikrar Tulus Toliu¹, Een N. Walewangko², Jacline I. Sumual³

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

E-mail: Tulustoliu017@gail.com

ABSTRAK

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi ekonomi yang beragam, namun pembangunannya belum merata di seluruh kabupaten/kota. Penelitian ini menganalisis disparitas pembangunan antar wilayah di Provinsi Gorontalo periode 2016-2023 menggunakan Indeks Williamson yang mengombinasikan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016–2019, ketimpangan cenderung menurun, ditandai dengan penurunan indeks dari 0,36 menjadi 0,34 yang masuk dalam kategori rendah. Namun, ketimpangan meningkat kembali pada masa pandemi COVID-19, dengan indeks mencapai 0,40 dan bertahan hingga tahun 2022, lalu sedikit menurun ke angka 0,39 pada tahun 2023. Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo mendominasi perekonomian daerah, sedangkan daerah seperti Gorontalo Utara mengalami keterlambatan pembangunan. Temuan ini menunjukkan pentingnya kebijakan pembangunan yang inklusif, terutama di wilayah yang tertinggal. Upaya pemerataan pembangunan harus difokuskan pada penguatan sektor unggulan dan investasi infrastruktur dasar di daerah tertinggal guna mempercepat pemulihan pasca pandemi serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Disparitas Pembangunan, Indeks Williamson, Ketimpangan Wilayah, PDRB

ABSTRACT

Gorontalo Province is an area with diverse economic potential, but its development has not been evenly distributed throughout all districts/cities. This study analyzes the disparity in development between regions in Gorontalo Province for the 2016-2023 period using the Williamson Index which combines Gross Regional Domestic Product (GDP) data per capita and population size. The results of the study show that development inequality in Gorontalo Province has fluctuated. In 2016–2019, inequality tended to decrease, marked by a decrease in the index from 0.36 to 0.34 which was included in the low category. However, inequality increased again during the COVID-19 pandemic, with the index reaching 0.40 and lasting until 2022, then decreasing slightly to 0.39 in 2023. Gorontalo City and Gorontalo Regency dominate the regional economy, while areas such as North Gorontalo experience development delays. These findings show the importance of inclusive development policies, especially in underdeveloped areas. Efforts to equitably distribute development must be focused on strengthening leading sectors and basic infrastructure investment in disadvantaged areas to accelerate post-pandemic recovery and realize equitable and sustainable economic growth.

Keywords : Development Disparities, Williamson Index, Regional Inequality, GRDP

1. PENDAHULUAN

Disparitas ekonomi antar wilayah adalah fenomena yang sering terjadi dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Pada dasarnya, disparitas ini disebabkan oleh perbedaan dalam sumber daya alam dan kondisi demografi yang ada di masing-masing daerah. Perbedaan ini mengakibatkan variasi dalam kemampuan suatu daerah untuk mendorong proses pembangunan. Tingginya tingkat disparitas tidak hanya dapat menimbulkan ketegangan sosial, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Hartati, 2019).

Kondisi yang berbeda di setiap daerah mengakibatkan strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah juga bervariasi. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan potensi sumber daya, aktivitas manusia, dan pertumbuhan penduduk yang ada di masing-masing wilayah. Selain itu, pembangunan sering kali terfokus hanya di daerah pusat, sementara daerah pendukung kurang mendapatkan perhatian. Untuk memastikan pembangunan berjalan secara seimbang dan efektif, pemerintah perlu memperhatikan semua daerah tanpa memberikan perlakuan khusus kepada masing-masing wilayah. Pembangunan ekonomi seharusnya dilihat sebagai suatu proses yang bersifat multidimensional, yang melibatkan berbagai perubahan fundamental dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus tetap fokus pada percepatan pertumbuhan, penanganan disparitas pembangunan, dan pengurangan kemiskinan (Todaro & Smith, 2006).

Pembangunan daerah sesungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan harus dilakukan secara seimbang agar tidak menimbulkan protes dari daerah-daerah yang dapat berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jhingan, 2007).

Provinsi Gorontalo, dengan kekayaan sumber daya alam dan budaya yang beragam, memiliki potensi besar untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun Gorontalo menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas, upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang menjadi andalan daerah ini. Dengan memperhatikan karakteristik unik yang dimiliki, seperti keindahan alam dan keragaman budaya, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang tepat untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga Gorontalo dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.

**Tabel 1. PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) Provinsi Gorontalo**

Kabupaten /Kota	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boalemo	2886159	3078279	3284064	3504254	3497055	3568346	3677305	3839697
Gorontalo	7362443	7861953	8349313	8868730	8867720	9083620	9440538	9866472
Pohuwato	3815577	4074279	4338085	4610486	4602329	4704126	4849004	5062524
Bone Bolango	2601323	2785645	2965463	3153897	3155946	3225233	3355012	3505124
Gorontalo Utara	1896420	2036906	2177967	2325474	2325057	2376375	2454877	2560598
Kota Gorontalo	5021773	5394643	5772119	6173366	6172398	6347376	6608492	6907072

Sumber : Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan, terlihat bahwa PDRB di Gorontalo mengalami tren peningkatan dari tahun 2016 hingga 2023, dengan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo menjadi kontributor utama. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya ketimpangan (disparitas) pembangunan ekonomi antarwilayah di Provinsi Gorontalo, yang tercermin dalam perbedaan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di masing-masing kabupaten/kota. Meskipun Provinsi Gorontalo memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, namun tidak semua wilayah mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang merata. Beberapa wilayah seperti Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah lain seperti Gorontalo Utara tertinggal dalam hal pembangunan. Permasalahan ini menjadi lebih kompleks saat pandemi COVID-19 memperburuk ketimpangan tersebut.

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur tingkat disparitas Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2023.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah bersama masyarakatnya mengelola semua sumber daya yang tersedia dan membangun pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong perkembangan kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Arsyad, 2016).

Menurut Sukirno (2016), pembangunan ekonomi adalah usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperluas kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. pembangunan ekonomi merupakan proses dinamis yang ditandai dengan kenaikan pendapatan nasional riil,

perubahan struktural, serta perbaikan dalam aspek sosial, kelembagaan, dan teknologi. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dilihat sebagai proses jangka panjang yang berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (Jhingan, 2007).

2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu (Sukirno, 2016). Jhingan (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output nasional riil, yang diukur dengan meningkatnya PDB riil dalam jangka panjang. Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berhubungan erat dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya.

Menurut Hasyim, (2017), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama periode tertentu. Simon Kuznet menjabarkan pertumbuhan perekonomian negara sebagai peningkatan kompetensi suatu negara dalam menyediakan persediaan ekonomi kepada warganya. Penguatan kapasitas ini didorong oleh perkembangan teknologi, institusi, dan penyelarasan ideologi yang diperlukan (Arsyad, 2010).

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan output per kapita dalam jangka panjang. Terdapat tiga aspek utama dalam definisi ini, yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berfungsi untuk mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian.

2.3 Ketimpangan Pembangunan

Todaro & Smith (2006) berpendapat bahwa ketimpangan pembangunan adalah distribusi yang tidak merata dari hasil pembangunan ekonomi yang menyebabkan sebagian besar keuntungan hanya dinikmati oleh kelompok atau wilayah tertentu. Ketimpangan pembangunan terjadi ketika pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di daerah tertentu dan tidak tersebar secara merata, sehingga menciptakan disparitas pendapatan dan kesejahteraan (Boediono, 1999).

Sjafrizal (2012) berpendapat bahwa ketimpangan pembangunan antardaerah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu daerah. Fenomena ini tidak saja terjadi pada negara berkembang, tetapi pada negara maju walaupun tingkat ketimpangannya berbeda. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing daerah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga berbeda.

Ketimpangan wilayah adalah perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar daerah, yang ditunjukkan melalui disparitas pendapatan, infrastruktur, kualitas hidup, dan kesempatan ekonomi. Ketimpangan wilayah terjadi ketika distribusi hasil pembangunan tidak merata antar daerah, baik antar wilayah pusat dan daerah tertinggal, maupun antar kota dan desa (Kuncoro, 2003).

2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau sebagai jumlah keseluruhan nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh semua unit ekonomi di wilayah tersebut. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, semakin baik pula kegiatan ekonomi di daerah tersebut.

Menurut BPS (2025), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah, yang mencakup sektor pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain.

PDRB dianggap sebagai indikator penting untuk mengukur tingkat output dan pendapatan regional dalam suatu negara. PDRB mencerminkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua unit produksi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Todaro menekankan bahwa meskipun PDRB menunjukkan pertumbuhan ekonomi, namun belum tentu mencerminkan pembangunan yang merata atau kesejahteraan masyarakat, karena tidak memperhitungkan distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan, atau kualitas hidup.(Todaro & Smith, 2006).

2.5 Penelitian Terdahulu

Anwar et al. (2023), "Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2012 – 2021. Alat analisis yang

digunakan adalah Indeks Williamson. Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara adalah rendah atau merata dengan rata – rata angka Indeks Williamson 0,49 (< 0,5).

Terok et al. (2019) “Analisis Komparatif Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Tenggara”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sumber daya dalam sektor perkebunan terhadap ketimpangan wilayah sulawesi utara dan sulawesi tenggara. Analisis data berupa analisis secara deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel dan kuadran dengan menggunakan alat analisis Williamson Index dan Analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor perkebunan, dan IPM(indeks pembangunan manusia) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan dan terdapat perbedaan bahwa sulawesi utara lebih unggul dari sektor perkebunan dan IPM dibandingkan sulawesi tenggara di lihat dari perbedaan jumlah rata-rata sektor perkebunan dan IPM sulawesi utara dan sulawesi tenggara.

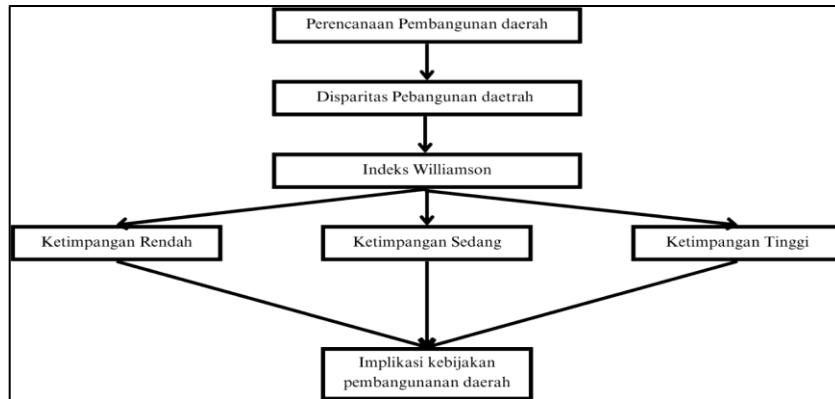
Koagow et al. (2022), “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungannya dengan Investasi di Provinsi Sulawesi Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas pembangunan ekonomi dan hubungannya dengan investasi di Sulawesi utara tahun 2011 – 2020. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan teknik analisa yang di gunakan dalam Model Analisis Indeks Williamson dan uji korelasi Person, maka diketahui Di Sulawesi utara pemerataan pembangunan Berada bahwa ketimpangan di Sulawesi Utara tergolong menengah Berdasarkan hasil menunjukkan hubungan yang cukup lemah antara variabel disparitas dengan PMA dan PMDN, dengan arah negative peningkatan PMA dan PMDN menyebabkan Penurunan disparitas pembangunan ekonomi di Sulawesi utara , namun, berdasarkan nilai signifikansi hasilnya tidak ada korelasi antara PMDN dan PMA.

Ambar et al., (2021), “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019”. Tujuan Penelitian ini menganalisis disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah Kabupaten/Kota dan Struktur pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2019 serta Hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Pearson Korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka Indeks Williamson di Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir adalah kategori ketimpangan taraf rendah. Sedangkan untuk pengklasifikasian daerah berdasarkan wilayah menggunakan Tipologi Klassen dengan pendekatan daerah terbagi atas: Daerah maju dan tumbuh cepat, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah; Daerah maju tapi tertekan, yakni Kabupaten Halmahera Timur; Daerah cepat berkembang tapi tidak maju yakni, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Taliabu; Daerah relatif tertinggal yakni, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kota Tidore.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2019). Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka skema dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: data diolah, 2025

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perencanaan pembangunan daerah yang tidak merata dapat menimbulkan disparitas pembangunan antarwilayah. Disparitas tersebut kemudian diukur melalui pendekatan kuantitatif menggunakan Indeks Williamson, yang menjadi alat utama dalam menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan kausal sebagai berikut:

Perencanaan pembangunan daerah → Disparitas pembangunan daerah → Pengukuran melalui Indeks Williamson → Kategori ketimpangan (rendah, sedang, tinggi) → Implikasi terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Setiap tingkat ketimpangan memberikan arah yang berbeda terhadap kebijakan pembangunan yang harus diambil oleh pemerintah daerah. Apabila ketimpangan rendah, maka fokus kebijakan dapat diarahkan pada pemeliharaan keberlanjutan. Jika ketimpangan tergolong sedang, diperlukan kebijakan penguatan di wilayah marginal. Namun, jika ketimpangan tinggi, maka dibutuhkan intervensi lebih agresif, seperti peningkatan investasi publik dan program afirmatif di daerah tertinggal. Dengan demikian, kerangka ini menjelaskan bagaimana analisis kuantitatif ketimpangan pembangunan dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berbasis data.

Dengan menggunakan Indeks Williamson sebagai alat analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat ketimpangan dan mengidentifikasi daerah-daerah yang mengalami kesenjangan paling besar dalam hal kontribusi ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif kuantitatif, sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai fenomena yang diteliti, dengan menggunakan data numerik untuk menganalisis dan menjelaskan karakteristik serta hubungan antar variabel yang relevan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diangkat, serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang tepat (Martono & Nanang, 2015).

3.2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. . Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro & Supomo, 1999). Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi, bukti, atau fakta dari objek atau subjek penelitian sesuai dengan tujuan studi dan jenis data yang dibutuhkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series untuk tahun 2016-2023. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup buku-buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Sutama (2016) menyatakan bahwa definisi operasional memberikan spesifikasi kegiatan yang diperlukan untuk mengukur, mengkategorikan atau memanipulasi variabel dalam penelitian. Untuk menyamakan pemahaman mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan menghindari perbedaan penafsiran, penulis memberikan batasan definisi operasional sebagai berikut:

1. PDRB Per Kapita ADK Kabupaten/Kota di Gorontalo 2016-2023 PDRB per kapita wilayah-wilayah administratif di Provinsi Gorontalo dihitung dengan membagi total nilai PDRB masing-masing kabupaten/kota (atas dasar harga konstan) dengan jumlah penduduknya setiap tahun. Perhitungan ini mencakup pengolahan data produksi barang/jasa dan data kependudukan selama periode 2016-2023. Indikator ini menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat di tiap wilayah administratif Gorontalo dan diukur dalam satuan rupiah.
2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Gorontalo 2016-2023 Data ini merepresentasikan total

populasi resmi di setiap wilayah administratif Provinsi Gorontalo yang dicatat secara tahunan oleh Badan Pusat Statistik dan dikukur dalam satuan jiwa.

3.5. Metode Analisis Data

Suryabrata (2011) menyatakan bahwa analisis data merupakan langkah lanjutan dari pengumpulan data yang bertujuan untuk mengolah informasi menjadi makna yang dapat dipahami, sehingga menghasilkan kesimpulan ilmiah

Analisis Indeks Williamson

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Indeks Williamson. Indeks ini pertama kali diperkenalkan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965 dan telah menjadi salah satu indikator penting dalam studi ekonomi pembangunan. Indeks Williamson digunakan untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah (Sjafrizal, 2012). Kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo diukur dengan Indeks Williamson. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y^2)fi/n}}{Y}$$

Keterangan:

Iw = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita di kabupaten/kota i

Y = PDRB per kapita rata-rata provinsi

fi = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk provinsi

Indeks Williamson ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu:

$Iw < 0,35$: Ketimpangan taraf rendah

$0,35 < Iw < 0,50$: Ketimpangan taraf menengah

$Iw > 0,50$: Ketimpangan taraf tinggi

Hasil dari perhitungan Indeks Williamson memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan Antar Wilayah. Jika nilai Indeks Williamson (Iw) mendekati angka satu, hal ini mencerminkan bahwa ketimpangan ekonomi antar daerah semakin melebar. Artinya, terdapat disparitas yang signifikan dalam pembagian sumber daya ekonomi dan peluang pembangunan di antara kabupaten-kota dalam wilayah tersebut. Sebaliknya, jika nilai Iw mendekati angka nol, itu menunjukkan bahwa ketimpangan semakin kecil, menandakan adanya upaya atau kondisi di mana distribusi kekayaan dan peluang ekonomi lebih merata. Hasil perhitungan Indeks Williamson memberikan indikasi penting terkait dinamika ketidaksetaraan ekonomi antar daerah, yang dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong pembangunan yang inklusif di tingkat regional (Kuncoro, 2003).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Geografis Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo terletak di bagian utara Pulau Sulawesi, dengan wilayah yang terdiri dari daratan dan perairan. Secara geografis, Gorontalo berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah utara, Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur, Teluk Tomini di sebelah selatan, dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat. Topografi wilayahnya bervariasi, mulai dari dataran rendah di pesisir hingga pegunungan di bagian tengah, dengan Gunung Tentolomatinan sebagai titik tertinggi. Kabupaten-kabupaten seperti Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, dan Gorontalo Utara memiliki karakteristik geografis yang berbeda, seperti hutan, savana, dan lahan pertanian yang subur. Sementara itu, Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi terletak di daerah pesisir dengan akses strategis ke pelabuhan dan bandara.

Iklim di Gorontalo umumnya tropis dengan musim hujan dan kemarau yang jelas. Curah hujan tertinggi terjadi di daerah pegunungan, sementara wilayah pesisir lebih kering. Beberapa daerah seperti Bone Bolango dan Pohuwato memiliki sungai-sungai penting yang mendukung irigasi pertanian, seperti

Sungai Bone dan Sungai Paguyaman. Selain itu, Gorontalo juga memiliki kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yang melintasi beberapa kabupaten. Keberagaman geografis ini menjadikan Gorontalo kaya akan sumber daya alam, baik di sektor pertanian, perkebunan, maupun perikanan.

4.2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Gorontalo

Jumlah penduduk merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan Indeks Williamson. Data jumlah penduduk Provinsi Gorontalo disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Gorontalo
Tahun 2016 - 2023

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boalemo	154008	158333	162577	167024	145868	147038	148526	151337
Gorontalo	372856	374923	377048	378527	393107	395635	398801	405322
Pohuwato	150385	153991	157551	161373	146432	147689	149297	151850
Bone Bolango	155238	157186	159194	161236	162778	164277	166200	168556
Gorontalo Utara	111824	112975	114036	115072	124957	126521	128563	130722
Kota Gorontalo	206454	210782	215086	219399	198539	199788	201350	205395

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2025

Data jumlah penduduk Provinsi Gorontalo (2016-2023) menunjukkan pola pertumbuhan yang bervariasi di tiap wilayah. Kabupaten Gorontalo mencatat pertumbuhan tertinggi (dari 372.856 menjadi 405.322 ribu jiwa), diikuti Bone Bolango yang konsisten meningkat setiap tahun. Sementara itu, Boalemo, Pohuwato, dan Kota Gorontalo sempat mengalami penurunan populasi pada 2020 (masing-masing turun sekitar 10-15 ribu jiwa) sebelum kembali pulih di tahun berikutnya. Gorontalo Utara tumbuh stabil meski dengan angka absolut terendah (130.722 ribu jiwa pada 2023). Fluktuasi pada 2020 diduga terkait dampak pandemi dan mobilitas penduduk, sementara pemulihan di tahun-tahun berikutnya menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap kondisi baru. Perbedaan pertumbuhan antaraerah mencerminkan variasi daya tarik ekonomi dan kualitas hidup di masing-masing kabupaten/kota.

4.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten / Kota Provinsi Gorontalo

Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Berikut adalah data PDRB Provinsi Gorontalo:

Tabel 3. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten / Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2016 - 2023

Kabupaten/ Kota	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boalemo	18740.3	19441.8	20200.1	21607.1	24027.3	24204.2	24623.2	25381.8
Gorontalo	19746.1	20969.5	22143.9	23670	22596	22895.4	23542	24344.9
Pohuwato	25372.1	26457.9	27534.5	29321.5	31505.8	31788.5	32356.5	33353.1
Bone Bolango	16757	17722	18628	20119.3	19439	19623.8	20159	20800.9
Gorontalo Utara	16959	18029.7	19098.9	20774.5	18676.8	18774.4	19089.1	19595.8

Sumber: Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2025

Data PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Gorontalo (2016–2023) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang beragam di tiap kabupaten/kota. Pohuwato mencatat nilai tertinggi (Rp33,35 triliun pada 2023) dengan tren konsisten, diikuti Boalemo yang tumbuh stabil meski sempat melonjak pada 2020. Kota Gorontalo dan Bone Bolango mengalami fluktuasi, khususnya penurunan di 2020 akibat dampak pandemi, tetapi keduanya berhasil pulih secara bertahap. Sementara itu, Gorontalo Utara menjadi wilayah dengan pemulihan paling lambat, di mana PDRB 2023 (Rp19,59 triliun) masih di bawah capaian 2019 (Rp20,77 triliun). Secara keseluruhan, data ini mencerminkan ketahanan ekonomi Pohuwato dan Boalemo, sekaligus tantangan pemulihan di wilayah lain, terutama Gorontalo Utara.

4.4. Hasil Analisis Indeks Williamson

Tabel 4. Indeks Williamson Provinsi Gorontalo 2016-2023

Provinsi Gorontalo		
Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2016	0.36	Ketimpangan taraf menengah
2017	0.35	Ketimpangan taraf rendah
2018	0.35	Ketimpangan taraf rendah
2019	0.34	Ketimpangan taraf rendah
2020	0.40	Ketimpangan taraf menengah
2021	0.40	Ketimpangan taraf menengah
2022	0.40	Ketimpangan taraf menengah
2023	0.39	Ketimpangan taraf menengah

Sumber: data diolah, 2025

Data Indeks Williamson Provinsi Gorontalo tahun 2016-2023 menunjukkan dinamika ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota yang berfluktuasi antara tingkat rendah dan menengah. Indeks ini mengukur kesenjangan ekonomi wilayah dengan kriteria: $<0,35$ (rendah), $0,35-0,50$ (menengah), dan $>0,50$ (tinggi). Provinsi Gorontalo mengalami perubahan pola ketimpangan ekonomi. Periode 2016-2019 menunjukkan perbaikan dengan turunnya indeks dari 0,36 (menengah) ke 0,34 (rendah). Namun, terjadi lonjakan pada 2020 (0,40) yang bertahan hingga 2023 meski sedikit membaik di tahun terakhir (0,39). Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pandemi dan faktor eksternal lain berdampak signifikan terhadap kesenjangan antardaerah, meski provinsi ini berhasil menghindari kategori ketimpangan tinggi.

4.5. Pembahasan

Provinsi Gorontalo menunjukkan perkembangan positif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antarkabupaten/kota. Indeks Williamson berhasil turun dari 0,36 (kategori menengah) di tahun 2016 menjadi 0,34 (kategori rendah) di tahun 2019. Penurunan yang stabil selama empat tahun ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan daerah saat itu relatif berhasil dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Pencapaian terbaik terjadi di tahun 2019 ketika indeks menyentuh angka terendah dalam seluruh periode pengamatan. Penurunan ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi pemerataan pembangunan antar kabupaten/kota di Gorontalo. Penurunan ketimpangan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh implementasi program dana desa yang mulai dirasakan dampaknya secara lebih merata, peningkatan alokasi anggaran pembangunan ke wilayah-wilayah tertinggal, pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi basis ekonomi di sebagian besar daerah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan di Gorontalo dalam periode tersebut cukup berhasil dalam mengurangi disparitas antar wilayah.

Tahun 2020 menjadi titik balik dengan lonjakan indeks ke angka 0,40 yang termasuk kategori menengah. Kenaikan ini sangat mungkin dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor-sektor ekonomi secara tidak merata di berbagai wilayah. Pandemi membawa dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah dengan ketergantungan tinggi terhadap sektor informal, perdagangan lokal, dan mobilitas antarwilayah. Kabupaten/kota yang sebelumnya sudah relatif tertinggal semakin terpukul oleh keterbatasan akses layanan, lemahnya koneksi, serta terbatasnya kapasitas fiskal daerah untuk melakukan pemulihan ekonomi. Yang mengkhawatirkan, level ketimpangan ini bertahan selama tiga tahun berturut-turut (2020-2022), sebelum akhirnya menunjukkan sedikit perbaikan di tahun 2023 dengan turun ke 0,39. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ketimpangan pasca pandemi berjalan lambat dan membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih efektif.

Provinsi Gorontalo patut diapresiasi karena berhasil menjaga ketimpangan tetap di bawah ambang kategori tinggi (0,50) meskipun fluktuasi terjadi. Namun, fakta bahwa indeks belum mampu kembali ke level pra-pandemi (di bawah 0,35) menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah provinsi perlu memprioritaskan program-program yang secara khusus ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah, terutama dengan memperkuat sektor-sektor unggulan di kabupaten/kota yang tertinggal.

Indeks Williamson yang tinggi mengindikasikan bahwa hasil pembangunan belum tersebar secara merata, dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Oleh karena itu, menurunkan nilai indeks ini merupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan pemerataan pembangunan. Upaya untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif memerlukan kombinasi strategi, antara lain peningkatan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, alokasi anggaran yang lebih berpihak pada wilayah dengan potensi ekonomi rendah, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola Dana Desa secara efektif dan partisipatif.

Monitoring dan evaluasi berkala menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan benar-benar memberikan dampak terhadap pengurangan kesenjangan. Indikator seperti Indeks Williamson tidak hanya menjadi alat ukur statistik, tetapi juga menjadi instrumen refleksi bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan arah kebijakan. Misalnya, jika ketimpangan masih tinggi meskipun alokasi anggaran telah ditingkatkan, maka perlu dilihat apakah distribusi tersebut tepat sasaran atau terdapat kelemahan dalam implementasi di tingkat lokal.

Dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis data serta mempertimbangkan aspek spasial dan sosial-ekonomi, Provinsi Gorontalo memiliki peluang besar untuk membalik tren ketimpangan tersebut. Pembangunan yang merata bukan hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga prasyarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat kohesi sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Analisis Indeks Williamson Provinsi Gorontalo tahun 2016-2023 mengungkapkan dua fase perkembangan ketimpangan yang berbeda. Fase pertama (2016-2019) ditandai oleh perbaikan berkelanjutan dengan turunnya indeks dari kategori menengah ke rendah, menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerataan. Namun, fase kedua (2020-2023) menunjukkan kemunduran dengan kenaikan indeks ke level menengah yang bertahan hingga akhir periode, mengindikasikan dampak signifikan pandemi dan tantangan pemulihkan kesenjangan antardaerah.
2. Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan khusus untuk mengatasi ketimpangan wilayah di Gorontalo. Meski provinsi ini berhasil menghindari ketimpangan tinggi, stabilitas indeks pada level menengah pasca-2020 memerlukan intervensi terarah, khususnya pada sektor-sektor yang terdampak pandemi dan daerah-daerah tertinggal. Kebijakan ke depan perlu fokus pada percepatan pembangunan inklusif, penguatan koneksi antardaerah, dan program khusus untuk memulihkan ketimpangan ke level pra-pandemi, sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, A., Walewangko, E. N., & Tumangkeng, S. Y. L. (2021). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(1), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/34723>
- Anwar, A. A., Rorong, I. P. F., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 85–96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/49241>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Boediono. (1999). *Teori pertumbuhan ekonomi*. BPFE.
- BPS. (2025). *PDRB atas Dasar Harga Konstan dan Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo*.

- Hartati, Y. S. (2019). Analisis Disparitas Wilayah Antar Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 1–22. <https://ejurnal.stie-portnumbay.ac.id/index.php/jeb/article/view/236>
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Kencana Prenadamedia.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis* (1st ed.). BPFE.
- Jhingan, M. L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Koagow, Y. Y., Walewangko, E. N., & Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungan Dengan Investasi di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/42316>
- Kuncoro, M. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan* (3rd ed.). UPP AMP YKPN.
- Martono, & Nanang. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. PT. Rajawali Pers.
- Suryabrata, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Sutama. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Kuntitaif, kualitatif, PTK, dan R&D*. Fairuz Media.
- Terok, V. J., Engka, D. S. ., & Tumangkeng, S. Y. . L. (2019). Analisis Komparatif Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Dan Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 108–118. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/25006/24711>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga.